

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Feminisme dalam Hubungan Internasional merupakan isu yang diperhatikan dalam beberapa tahun maupun dekade terakhir dibandingkan isu lainnya. Para kaum feminis berfokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang apapun termasuk bidang politik dunia. Feminisme menurut Cynthia Enloe dalam buku *Banana, Beaches and Bases: Making Feminist Sense Of International Politics* (1989) menekankan pentingnya analisis gender dalam studi hubungan internasional. Ia berargumen bahwa untuk memahami dinamika global, kita perlu melihat bagaimana kebijakan luar negeri dan militerisme mempengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan tetapi penting dengan berbagai bidang termasuk bidang ekonomi internasional. Banyak perempuan bekerja di bidang industri yang tidak memadai dan berada dalam negara berkembang dengan bayaran rendah yang pada akhirnya perempuan kembali menempati posisi rendah dari sektor manapun dengan melakukan pekerjaan rumah tangga karena hal tersebut.

Tetapi poin utama dalam hal ini adalah bahwa isu feminisme dan gender sangat penting dalam dunia politik dan ekonomi internasional namun tak terlihat karena hubungan antara “maskulinitas” dan “feminitas” yang melihat posisi perempuan berada di bawah dari laki-laki. Feminisme muncul dalam hubungan internasional pada saat akhir tahun 1980-an dengan berawal dari pemikiran poststrukturalisme dan postkolonialisme yang terinspirasi oleh kaum feminis untuk mengkritisi para pakar hubungan internasional konvensional yang terlalu memikirkan studi politik internasional. Para kaum feminis mengkritisi pakar konvensional bahwa ide keamanan realis yang terlalu menunjukkan maskulinitas memandang dunia dan harus berdasarkan pertahanan militer dan anarki internasional tetapi harus menyembunyikan keberadaan hierarki gender dalam politik dunia

sebagai bentuk proteksi dari ancaman luar & proteksi subordinasi kaum perempuan yang harus ada. Dalam postkolonialisme, kaum feminis mengkritisi dan merekonstruksi eurocentrisme karena merendahkan negara berkembang dan maskulinitas dalam hubungan internasional dan menjadi catatan sensitif dalam gender untuk diperbaiki & menyoroti kaum perempuan. Kaum feminis menggunakan teori yang lain seperti konstruktivisme, liberalisme, dan marxisme namun banyak dari kaum feminis menolak terhadap metode positivis & postpositivis dan standar metodologi karena kecurigaan kaum feminis terhadap kebenaran yang berdasarkan perspektif maskulinitas yang dangkal dan khawatir dengan aliansi yang subordinasi pada pendekatan gender untuk teori yang lazim untuk merubah pandangan terhadap gender menurut prioritasnya (Jackson, R., & Sørensen, G. (2016)). .

Feminisme dapat dianggap sebagai teori arus utama hubungan internasional selama ada percakapan antara teori hubungan internasional tradisional dan teori hubungan internasional feminis. Dasar untuk memulainya adalah dari perkembangan teori hubungan internasional tradisional, yang kini telah mengadopsi pendekatan intersubjektif. Pembahasan lebih lanjut diperlukan tentang konsep kekuasaan, yang beroperasi dalam konstruksi makna praktik politik dunia. Kekuatan diskursif ini, menurut feminis, adalah yang disebut 'gender'. Jika teori hubungan internasional arus utama saat ini dapat menerimanya, ini akan menulis ulang hubungan internasional secara teoritis dan praktis. Dengan mempromosikan isu gender dalam hubungan internasional, feminisme memperkayanya dengan membuka ruang baru untuk memikirkan kembali dan menegaskan kembali tanggung jawab atas praktik dan kebijakan yang kita buat dalam politik dunia. Ini menyuarakan komitmen yang dibawa oleh hubungan internasional ketika pertama kali dibentuk: "untuk membawa penelitian dan refleksi untuk mengatasi masalah politik internasional yang mendasar, dan menghasilkan ide-ide yang dapat menginformasikan perdebatan dengan ruang publik"(Jackson, R., & Sørensen, G. (2016)).

Keberhasilan feminisme dalam hubungan internasional dapat terlihat berhasil dengan luar biasa karena mulai banyaknya perspektif feminisme yang dikaitkan dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, transnasionalisme, pembangunan, dll. Perspektif feminisme ini membantu mengkonseptualisasi bidang lainnya untuk dikaji hal yang baru dan perkembangannya terus lebih baik dengan menjadi perspektif yang marginal diakui hal umum namun harus memperhatikan batasannya.

Isu feminisme di Korea Selatan merupakan isu yang kompleks dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Negara Korea Selatan harus menghadapi tantangan unik karena berada di persimpangan antara nilai-nilai tradisional yang patriarki dan perubahan sosial modern yang mendorong kesetaraan gender. Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara maju dengan ekonomi yang berkembang pesat, ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah struktural yang signifikan dimana tingkat partisipasi perempuan dalam pasar kerja, representasi politik, serta akses terhadap posisi kepemimpinan masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki.

Kasus yang terjadi dalam isu feminisme di Korea Selatan ini memiliki berbagai macam baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang lain seperti politisasi gender “Idaenam”, molka (kamera tersembunyi), diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan, kejahatan digital, pelecehan terhadap aktivis feminis, dan penolakan pembubaran Kementerian Kesetaraan Gender & Keluarga.

Dalam kasus tersebut yang ditangani oleh Korean Women’s Associations United ini terdapat apa yang sudah dilakukan dengan memberikan pernyataan dan solusi dari kasus tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Politisasi gender “Idaenam”: mengkritisi “Idaenam” dengan populisme maskulin yang memanfaatkan sentimen anti-feminis untuk keuntungan politik, menyanggah klaim “Idaenam” yang menyebut bahwa laki-laki muda adalah korban utama diskriminasi dengan data ketimpangan gender

dan kerangka hak asasi manusia, dan kampanye edukasi tentang feminisme kepada kaum muda.

2. Molka (kamera tersembunyi): kampanye digital tentang kejahatan digital berbasis gender, menuntut reformasi hukum tentang kejahatan digital berbasis gender, memberikan pendampingan terhadap korban kejahatan digital berbasis gender, dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun internasional.
3. Pelecehan terhadap aktivis feminis: menyediakan perlindungan hukum bagi aktivis feminis, mengancam keras pelecehan verbal dan serangan daring (cyberbullying) terhadap aktivis feminis yang vokal memperjuangkan kesetaraan gender, memperkuat Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan menuntut aparat penegak hukum agar menindak tegas pelaku doxing, ancaman pembunuhan, dan pelecehan seksual terhadap aktivis perempuan.
4. Penolakan pembubaran Kementerian Kesetaraan Gender & Keluarga (MOGEF): Korean Women's Associations United memimpin berbagai aksi, kampanye, petisi dan pernyataan publik menolak penghapusan kementerian tersebut, yang mereka nilai sebagai langkah mundur dalam perjuangan kesetaraan gender, mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pembubaran kementerian ini akan melemahkan institusionalisasi kesetaraan gender di Korea Selatan dan mengancam keberlangsungan perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, dan partisipasi dalam forum internasional (CEDAW 2024) menyatakan rencana pembubaran Kementerian Kesetaraan Gender & Keluarga (MOGEF) bertentangan dengan komitmen Korea Selatan dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan data dari World Economic Forum (2023), Korea Selatan menempati peringkat ke-105 dari 146 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender Global, dengan skor rendah terutama pada dimensi partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik perempuan dengan membahas skor kesenjangan gender global di empat komponen utama (subindeks) indeks: Partisipasi Ekonomi dan Peluang, Capaian Pendidikan,

Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, dan Pemberdayaan Politik. Dengan demikian, dalam bagian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong skor kesenjangan gender global rata-rata secara keseluruhan. (WEF, 2023).

Gerakan feminis di Korea Selatan mengalami kebangkitan baru sejak pertengahan 2010-an, ditandai dengan gelombang protes publik seperti gerakan "Escape the Corset", serta unjuk rasa besar-besaran melawan kamera tersembunyi (spy cam) pada 2018. Gerakan-gerakan ini memperlihatkan bagaimana perempuan Korea Selatan secara kolektif menyuarakan penolakan terhadap standar kecantikan yang mengekang serta kekerasan seksual yang seringkali tidak ditangani secara adil oleh sistem hukum. Di sisi lain, muncul pula gerakan anti feminisme yang menyebut feminisme sebagai bentuk kebencian terhadap laki-laki, memperlihatkan adanya resistensi terhadap perubahan sosial yang diusung gerakan feminis (Kim, 2021). Masalah-masalah utama yang dihadapi perempuan di Korea Selatan antara lain adalah diskriminasi di tempat kerja, beban ganda rumah tangga, serta kekerasan berbasis gender. Salah satu isu yang paling menonjol adalah kesenjangan upah berdasarkan gender yang mencapai sekitar 31.5%, menjadikan Korea Selatan sebagai negara dengan kesenjangan upah gender tertinggi di antara negara-negara OECD (OECD, 2022).

Selain itu, fenomena digital sex crimes, termasuk kamera tersembunyi (molka), telah menjadi krisis sosial yang memperlihatkan rendahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan di ruang publik dan digital (Chung, 2020). Gerakan feminis di Korea Selatan juga menghadapi tantangan budaya dan sosial yang unik, seperti budaya patriarki yang mengakar kuat, serta adanya resistensi dari sebagian kelompok masyarakat terhadap narasi kesetaraan gender. Munculnya gerakan antifeminis di kalangan laki-laki muda, yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan afirmatif terhadap perempuan, menjadi dinamika tersendiri dalam perkembangan feminisme di negeri ini (Kim, 2021).

Meski demikian, gerakan feminisme tetap tumbuh melalui berbagai platform, baik secara online maupun melalui organisasi seperti *Korean Women's Associations United* (KWAU), yang aktif mengadvokasi isu-isu perempuan dan mendorong perubahan kebijakan publik. Pemerintah Korea Selatan telah merespons isu ini dengan sejumlah kebijakan, namun upaya tersebut masih dianggap minim oleh banyak aktivis. Non Governmental Organization (NGO) seperti *Korean Women's Associations United* (KWAU) berperan penting dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih progresif. Selain itu, keterlibatan lembaga internasional seperti UN Women dalam mendukung kesetaraan gender juga memberi tekanan moral dan politik terhadap negara untuk lebih serius dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan gender (UN Women, 2022). Gerakan feminisme di Korea Selatan mengalami transformasi signifikan sejak era 1990-an, ditandai dengan munculnya organisasi perempuan seperti *Korean Women's Associations United* (KWAU) yang memperjuangkan hak reproduksi, perlindungan hukum untuk perempuan, dan kesetaraan kerja. Namun, dalam dekade terakhir, muncul pula gelombang feminisme digital yang banyak dimotori oleh generasi muda melalui media sosial dan komunitas daring, seperti “Megalia” dan “Womad”. Fenomena ini menunjukkan pergeseran taktik gerakan dari pendekatan institusional ke arah ekspresi radikal dan konfrontatif (Jeong & Lee, 2020).

Meskipun demikian, feminisme di Korea Selatan juga menghadapi resistensi kuat, terlihat dari munculnya gerakan anti feminis dan meningkatnya misoginisme di ruang publik, bahkan di kalangan generasi muda laki-laki (Sung, 2021). Dalam konteks ini, penting untuk memahami dinamika feminisme di Korea Selatan tidak hanya sebagai persoalan domestik, tetapi juga sebagai bagian dari wacana global mengenai hak-hak perempuan, patriarki, dan keadilan sosial. Isu-isu seperti diskriminasi di tempat kerja, gap upah gender yang signifikan, kekerasan berbasis gender, serta keterbatasan partisipasi perempuan dalam politik menegaskan pentingnya analisis lebih mendalam terhadap dinamika feminisme di Korea Selatan.

Penelitian ini memiliki tujuan yang menarik untuk diteliti karena fokus pada memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan pada isu-isu spesifik yang dihadapi oleh perempuan yang mengalami diskriminasi gender dan memperjuangkan kesetaraan gender. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa semua suara perempuan didengar dalam advokasi kesetaraan gender. Dalam menghadapi tantangan yang ada, Korean Women Association United terus berupaya untuk berinovasi dalam strategi advokasinya. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, Korean Women Associations United dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menggalang dukungan untuk isu-isu kesetaraan gender, hal ini menjadi semakin relevan di masa pada saat ini. Pada kesempatan ini Korean Women Associations United diharapkan menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Korean Women's Association United dalam kesetaraan gender di Korea Selatan?
2. Bagaimana diskriminasi terhadap perempuan di Korea Selatan?
3. Bagaimana upaya Korean Women's Association United melalui advokasi feminisme di Korea Selatan?

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar tidak ada kesalahan maupun perluasan masalah pokok dalam penelitian untuk lebih tertata dan mempermudah dalam bagian pembahasan sehingga tujuan penelitian tercapai. Fokus penelitian ini adalah upaya advokasi Korean Women's Association United melalui program advokasi hak perempuan, peringatan hari perempuan internasional dan diadakannya forum&konferensi dalam memperjuangkan kesetaraan gender dari tahun 2022 sampai dengan tahun

2024 di karenakan laporan pada tahun tersebut cukup banyak terkait kasus diskriminasi perempuan dalam kesetaraan gender di Korea Selatan.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Korean Women's Associations United dalam kesetaraan gender di Korea Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan kondisi diskriminasi gender di Korea Selatan
3. Untuk mendeskripsikan upaya Korean Women's Associations United melalui advokasi feminisme di Korea Selatan.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian Hubungan Internasional dalam bidang Feminisme.
2. Secara Praktis: penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi dalam mengkaji kesetaraan gender melalui perspektif Hubungan Internasional
3. Secara Akademis: penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan penulis dan sebagai syarat menempuh tugas akhir pada prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pasundan.

1.5. Kerangka Teoritis-Konseptual

Dalam penulisan ini terdapat diperlukannya kerangka teoritis untuk melihat teori yang ditawarkan dapat digunakan untuk menganalisis suatu fenomena dengan perspektif. Keberadaan kerangka teoritis ini membuat analisis fenomena yang dapat diperjelas dengan beberapa perspektif diantaranya sebagai berikut:

1.5.1. Feminisme Radikal

Feminisme radikal merupakan gerakan feminis yang secara progresif melihat dari sumber ke sumbernya yaitu patriarki yang dimana dalam kesetaraan gender harus dihapuskan dalam kehidupan sehari-hari. Patriarki bisa ditanam berawal baik dari keluarga, pendidikan, buku yang dibaca dan pemuka agama. Feminisme radikal menyoroti bagaimana akar penindasan perempuan yang terletak pada struktur patriarki, khususnya dalam institusi keluarga. Perspektif ini mengkritik peran tradisional perempuan sebagai istri dan ibu yang dianggap membatasi kebebasan dan potensi individu perempuan. Feminisme radikal mendorong dengan pembebasan perempuan dari norma-norma sosial yang mengekang, serta menuntut transformasi mendasar dalam struktur sosial dan budaya yang patriarki.

Menurut Firestone (1970), sistem reproduksi biologis dan struktur keluarga tradisional menjadi akar utama dominasi laki-laki terhadap perempuan. Oleh karena itu, feminisme radikal mendorong transformasi menyeluruh, termasuk redefinisi peran gender, pelepasan kontrol laki-laki atas tubuh perempuan, serta penghapusan norma-norma patriarkis. Dalam konteks gerakan perempuan di Korea Selatan, pendekatan feminisme radikal penting untuk menganalisis bagaimana sistem patriarki membentuk budaya, hukum, dan praktik sosial yang mendiskriminasi perempuan. Ini termasuk kekerasan seksual, diskriminasi di tempat kerja, serta subordinasi dalam keluarga dan masyarakat.

Feminisme radikal membuat pemahaman bagaimana patriarki tertanam kuat dalam struktur sosial dan institusi negara. Korea Selatan, meskipun telah mengalami modernisasi pesat, masih mempertahankan norma-norma konservatif terkait peran gender, keluarga, serta ekspektasi terhadap perempuan. Fenomena seperti tekanan sosial untuk menikah, budaya kerja yang maskulin, serta rendahnya representasi

perempuan dalam politik dan posisi kepemimpinan mencerminkan kuatnya struktur patriarki.

Konsep feminisme radikal digunakan untuk menganalisis gerakan sosial di Korea Selatan yang dianggap diskriminasi terhadap perempuan. *Korean Women's Associations United (KWAU)* sebagai salah satu non governmental organization (NGO) terbesar di Korea Selatan telah memainkan peran penting dalam melawan struktur patriarki tersebut. *Korean Women's Associations United (KWAU)* tidak hanya mengadvokasi kesetaraan gender melalui jalur hukum dan kebijakan publik, tetapi juga menantang nilai-nilai sosial yang dianggap menormalisasi penindasan terhadap perempuan.

Melalui pendekatan yang dekat dengan feminisme radikal, *Korean Women's Associations United (KWAU)* turut mengangkat isu-isu seperti:

1. Kekerasan berbasis gender (termasuk kejahatan digital dan kekerasan dalam rumah tangga).
2. Ketimpangan gender dalam pekerjaan domestik.
3. Objektifikasi seksual perempuan dalam media dan budaya populer.
4. Kritik terhadap sistem militer dan nasionalisme yang berkontribusi pada maskulinitas yang parah.

Meskipun KWAU juga mengadopsi pendekatan feminisme liberal dalam ranah kebijakan (seperti mendorong representasi perempuan di parlemen), semangat transformasional yang diusungnya terutama dalam menggugat struktur budaya dan norma patriarki menunjukkan pengaruh kuat dari pemikiran feminisme radikal. Pendekatan ini dapat dilihat, misalnya, dalam dukungan KWAU terhadap gerakan #MeToo di Korea Selatan yang tidak hanya menuntut keadilan hukum bagi korban, tetapi juga mengajak masyarakat merefleksikan budaya kekuasaan laki-laki di berbagai lini.

Dengan demikian, teori feminisme radikal menjadi relevan untuk menganalisis strategi dan tujuan KWAU dalam memperjuangkan emansipasi perempuan, karena mampu menjelaskan bagaimana dominasi laki-laki bukan hanya persoalan hukum dan ekonomi, melainkan juga budaya dan ideologi yang berlembaga.

1.5.2. Non Governmental Organization (NGO)

Dalam hubungan internasional, aktor (state) seperti negara masih mendominasi. Namun, seiring berjalannya waktu dengan globalisasi dan meningkatnya interdependensi antarnegara, aktor non-negara seperti Non-Governmental Organizations (NGOs) semakin menonjol. Non-Governmental Organization (NGO) merupakan aktor non-negara yang berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik masyarakat sipil, termasuk isu kesetaraan gender. Dalam konteks hubungan internasional, NGO memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sosial karena kemampuannya dalam menggalang dukungan, membentuk opini publik, dan memengaruhi kebijakan negara.

NGO seringkali memiliki misi sosial, kemanusiaan, atau advokasi, serta memainkan peran penting dalam memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia, pembangunan, lingkungan, dan kesetaraan gender. Dalam hubungan internasional, NGO menjadi aktor non-negara yang signifikan karena mampu memengaruhi kebijakan, membentuk opini publik, serta menekan pemerintah atau lembaga internasional untuk melakukan perubahan.

NGO memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersifat independen dari pemerintah, meskipun bisa bekerja sama atau menerima dana dari pemerintah.
2. Tidak berorientasi pada keuntungan finansial.
3. Fokus pada pelayanan masyarakat, advokasi kebijakan, atau pemantauan pemerintah.

4. Memiliki legitimasi dari kepercayaan publik dan komunitas tempat mereka beroperasi.

Keberadaan NGO menjadi sangat penting dalam dunia internasional, khususnya di era globalisasi, karena mereka mampu melintasi batas negara dan menjembatani kebutuhan masyarakat sipil dengan lembaga-lembaga besar, baik nasional maupun internasional. Dalam konteks feminisme, banyak NGO yang berperan sebagai agen perubahan dengan mendorong kebijakan yang responsif gender dan menyuarakan hak-hak perempuan di ranah domestik maupun global.

Non-Governmental Organization (NGO) dipahami sebagai aktor non-negara yang memainkan peran penting dalam memperjuangkan norma-norma global, termasuk hak asasi manusia dan kesetaraan gender. NGO feminis seperti Korean Women's Associations United (KWAU) berperan strategis dalam mengartikulasikan kepentingan perempuan, membangun kesadaran publik, serta memengaruhi kebijakan nasional agar responsif terhadap isu-isu gender.

KWAU sebagai NGO feminis tidak hanya bekerja di tingkat domestik, tetapi juga membentuk jejaring dengan organisasi internasional seperti UN Women untuk menekan pemerintah Korea Selatan agar menerapkan kebijakan yang sejalan dengan standar internasional terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini menjadikan NGO sebagai bagian dari transnational advocacy networks (Keck & Sikkink, 1998), yaitu jaringan lintas negara yang mendorong perubahan norma melalui mobilisasi informasi, tekanan sosial, dan kerja sama strategis.

Dalam hal ini, NGO menjadi agen normatif yang mendorong negara untuk menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan gender sebagai bagian dari citra negara yang demokratis dan progresif. Selain itu, dari perspektif feminisme liberal, NGO feminis berjuang dalam kerangka institusional seperti melalui reformasi hukum, kebijakan publik, dan

partisipasi politik perempuan untuk mengatasi ketimpangan gender yang bersumber dari diskriminasi struktural.

Melalui pendekatan ini, NGO seperti *Korean Women's Associations United (KWAU)* tidak hanya menuntut perubahan pada tataran nasional, tetapi juga menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga internasional seperti UN Women guna memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap perjuangan mereka.

Sebagai NGO, *Korean Women's Associations United (KWAU)* menggabungkan kerja-kerja advokasi lokal dan internasional, menjadikannya aktor penting dalam pembentukan agenda feminis di Korea Selatan. Hal ini memperlihatkan bahwa NGO menjadi aktor penting dalam arena politik domestik maupun global, khususnya dalam mempromosikan norma kesetaraan gender, mendorong partisipasi politik perempuan, serta menentang budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat Korea Selatan.

1.5.3. Diskriminasi

Korean Women's Associations United (KWAU) memandang diskriminasi terhadap perempuan sebagai bentuk ketidaksetaraan struktural dan sistemik yang tertanam dalam norma sosial, hukum, dan kebijakan negara. Korean Women's Associations United (KWAU) melihat diskriminasi sebagai hasil dari sistem patriarki dan kapitalisme yang saling memperkuat subordinasi perempuan di berbagai sektor kehidupan. Korean Women's Associations United (KWAU) menekankan dalam berbagai pernyataan dan dokumen resmi bahwa diskriminasi perempuan bukan hanya terjadi secara individu, tetapi merupakan fenomena sosial yang terstruktur dan dipertahankan melalui kebijakan negara yang tidak responsif terhadap gender, budaya kerja yang maskulin, dan norma sosial yang membatasi peran perempuan.

Korean Women's Associations United (KWAU) mengidentifikasi diskriminasi terhadap perempuan melalui beberapa dimensi utama:

1. Diskriminasi Struktural

Karena norma sosial yang kuat, perempuan dimarginalkan dalam bidang pekerjaan, politik, pendidikan, dan hukum. Korean Women's Associations United (KWAU) menekankan ketimpangan upah, ketiadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan politik, serta akses terbatas terhadap jaminan sosial dan hak reproduksi.

2. Diskriminasi Kultural dan Ideologis

Korean Women's Associations United (KWAU) berpendapat bahwa budaya patriarkal membuat stereotip gender dan norma sosial yang membatasi perempuan, seperti peran tradisional sebagai ibu rumah tangga, harapan kesopanan, dan kontrol atas tubuh perempuan. Akibatnya, jenis kekerasan berbasis gender dan pelecehan seksual yang dilegitimasi secara sosial muncul.

3. Diskriminasi Hukum dan Institusional

Korean Women's Associations United (KWAU) menyoroti bahwa kebutuhan perempuan sering kali tidak dipenuhi oleh undang-undang dan kebijakan publik. Contohnya adalah undang-undang perburuhan yang tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban kekerasan seksual atau undang-undang yang tidak mengakomodasi kondisi kerja khusus perempuan, terutama pekerja rumah tangga, pekerja informal, dan buruh perempuan.

4. Diskriminasi dalam Kehidupan Sehari-hari (Everyday Discrimination}

Korean Women's Associations United (KWAU) menekankan bahwa penting bagi perempuan untuk mempertimbangkan pengalaman diskriminasi yang mereka alami dalam kehidupan

sehari-hari, seperti mikroagresi, pengucilan sosial, dan ketimpangan beban kerja domestik yang tidak terlihat tetapi terus berlanjut.

Korean Women's Associations United (KWAU) berpendapat bahwa diskriminasi terhadap perempuan bersifat sistemik dan interseksional, yang berarti bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena berbagai alasan, bukan hanya jenis kelaminnya. Faktor-faktor tersebut termasuk kelas sosial, pekerjaan, status perkawinan, orientasi seksual, dan jenis kelamin mereka. Oleh karena itu, Korean Women's Associations United (KWAU) menggunakan pendekatan feminis progresif untuk mengatasi diskriminasi perempuan, mengintegrasikan teori feminisme liberal dan radikal dan mendukung perubahan struktural di tingkat kebijakan dan budaya.

Selain itu, Korean Women's Associations United (KWAU) percaya bahwa diskriminasi gender terkait erat dengan isu hak asasi manusia secara global dan bukan hanya masalah di rumah. Oleh karena itu, Korean Women's Associations United (KWAU) aktif bekerja sama dengan jaringan internasional seperti UN Women dan forum-forum PBB seperti CEDAW dan CSW untuk memperjuangkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tingkat nasional dan internasional.

Korean Women's Associations United (KWAU) juga percaya bahwa diskriminasi adalah hambatan utama untuk mencapai kesetaraan substantif. Tanpa perubahan budaya dan struktural yang signifikan, kesetaraan formal dalam hukum dianggap tidak cukup. Oleh karena itu, perjuangan Korean Women's Associations United (KWAU) juga mencakup perubahan kebijakan publik, pemberdayaan perempuan akar rumput, dan penghapusan norma sosial yang menghambat suara dan peran perempuan.

1.5.4. Transnational Advocacy Network (TAN)

Dalam menjelaskan peran aktor non-negara dalam mempengaruhi kebijakan internasional, buku *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* karya Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1998) menjadi salah satu referensi utama. Keck dan Sikkink memperkenalkan konsep transnational advocacy networks (TANs), yaitu jaringan lintas negara yang terdiri dari individu maupun organisasi non-pemerintah yang bekerja sama berdasarkan nilai bersama untuk mendorong perubahan sosial dan politik. Konsep ini menjelaskan bagaimana aktor-aktor non-negara, seperti LSM, organisasi perempuan, aktivis HAM, dan organisasi internasional, membentuk jaringan lintas negara untuk memperjuangkan isu-isu tertentu, terutama yang berkaitan dengan norma-norma internasional dan hak asasi manusia.

TAN berperan dalam membentuk, menyebarkan, dan menegakkan norma internasional melalui empat taktik utama: informasi, simbolik, leverage, dan akuntabilitas. Salah satu kontribusi penting dalam buku adalah model boomerang pattern, yakni pola di mana aktor domestik yang menghadapi hambatan di tingkat nasional memanfaatkan jaringan internasional untuk menekan kembali negara asalnya melalui tekanan eksternal. Model ini sangat relevan dalam memahami dinamika advokasi feminis transnasional, khususnya ketika kelompok perempuan lokal menjalin aliansi dengan organisasi internasional seperti UN Women untuk mendorong perubahan kebijakan di negara mereka.

Dalam Transnational Advocacy Network terdapat cara kerja untuk membela kepentingan orang lain dapat dilihat sebagai berikut:

1. Information politics : kemampuan membuat informasi secara cepat dan tepat kepada khalayak masyarakat.

2. Symbolic politics: kemampuan menyuarakan tindakan yang dapat memberikan makna terhadap situasi tertentu kepada masyarakat di negara maupun manca negara.
3. Leverage Politics: pengaruh dari actor yang kuat untuk mempengaruhi situasi dengan actor yang lemah dengan tidak punya pengaruh.
4. Accountability politics: memanfaatkan aturan kepada negara yang kuat.

Dalam konteks Korea Selatan, *Korean Women's Associations United* (KWAU) merupakan contoh nyata dari aktor domestik yang terintegrasi dalam jaringan advokasi transnasional. *Korean Women's Associations United* (KWAU) aktif dalam menjalin hubungan dengan organisasi feminis global lainnya untuk memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di tingkat nasional.

Terdapat Beberapa aspek yang menunjukkan bagaimana KWAU beroperasi dalam kerangka TAN:

- Boomerang Pattern: Ketika pemerintah domestik tidak responsif terhadap tuntutan feminis, *Korean Women's Associations United* (KWAU) mengalihkan advokasinya ke level internasional dengan mengajukan laporan bayangan (shadow reports) ke CEDAW dan bekerja sama dengan UN Women. Tekanan internasional kemudian "dipantulkan" kembali ke pemerintah Korea Selatan untuk mendorong perubahan kebijakan.
- Framing Isu Secara Global: *Korean Women's Associations United* (KWAU) menggunakan narasi global seperti "gender equality" dan "eliminasi kekerasan terhadap perempuan" yang sudah diakui dalam dokumen internasional untuk memberikan legitimasi terhadap perjuangannya di dalam negeri.
- Koalisi Strategis: *Korean Women's Associations United* (KWAU) membentuk aliansi dengan organisasi feminis transnasional, serta

menjalin kemitraan dengan media dan akademisi, guna memperkuat advokasinya dan menambah kredibilitas.

- Produksi dan Sirkulasi Informasi: Dalam TAN, informasi adalah sumber kekuatan. *Korean Women's Associations United (KWAU)* memproduksi laporan, riset, dan kampanye berbasis data tentang ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan untuk menyampaikan narasinya ke komunitas global.

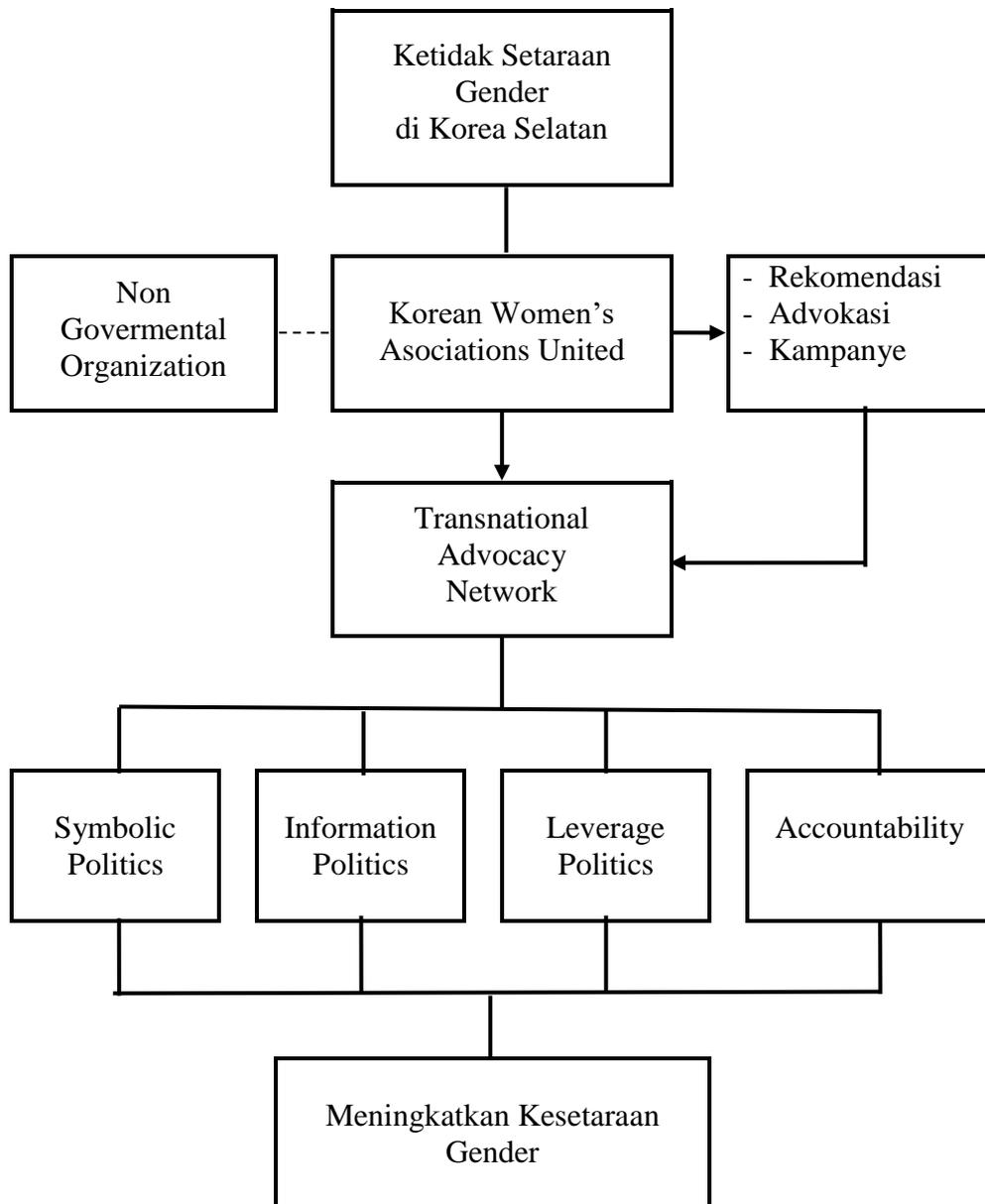
Dengan demikian, *Korean Women's Associations United (KWAU)* tidak hanya bertindak sebagai organisasi lokal tetapi juga sebagai bagian dari jaringan advokasi lintas negara yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan dan norma gender di Korea Selatan. Pendekatan ini memperlihatkan kekuatan hubungan antara aktor lokal dan jaringan global dalam memperjuangkan isu-isu hak perempuan.

1.6 Asumsi Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis dapat berasumsi pada penelitian ini sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan oleh *Korean Women Associations United* sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mendukung atau membantu kesetaraan gender yang dimana masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan di Korea Selatan dapat diperjuangkan dengan Transnational Advocacy Network melalui symbolic politic, information politic, leverage politic, dan accountability sebagai upaya *Korean Women Associations United* untuk advokasi feminisme dan memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan”.

1.7. Kerangka Analisis



Ketidaksetaraan gender di Korea Selatan merupakan permasalahan yang selama beberapa tahun terakhir menjadi isu yang di bicarakan bagi perempuan di Korea Selatan yang masih saja sering terjadi diskriminasi terhadap perempuan dari pihak manapun dengan adanya wadah advokasi *Non Govermental Organization* untuk memperjuangkan kesetaraan gender oleh *Korean Women's Associations United* dapat membantu para perempuan dapat memperjuangkan kesetaraan terhadap hak yang

diinginkan melalui rekomendasi, advokasi, dan kampanye dengan adanya *Transnational Advocacy Network* yang memiliki cara kerja untuk membela kepentingan orang lain dengan melalui symbolic politic, information politic, leverage politic, dan accountability yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender di Korea Selatan.